



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2021

TAHUN 2022



Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dapat melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) dan rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh sekretariat, bagian, bidang kerja dan UPT Dinas Pendidikan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Pendidikan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja sekretariat, bagian, bidang maupun UPT secara keseluruhan.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2021. Pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2021 ditetapkan 5 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja, yang dijabarkan dalam 4 program pembangunan Pendidikan. Secara umum Dinas Pendidikan berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Padang, Januari 2022

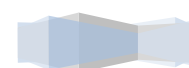
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Adib Aiffah, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19730413 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1
B. Aspek Strategis	8
C. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>)	9
D. Sistematik Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	18
B. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021	19
C. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	20
D. Realisasi Anggaran Tahun 2021	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran/Rekomendasi	52
LAMPIRAN	53



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan sejak tanggal 2 Mei 2019 dijabat Bapak Adib Alfikri, SE, Msi, menggantikan Drs. Burhasman MM.

1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan (SK Gubernur No:46 Tahun 2017)

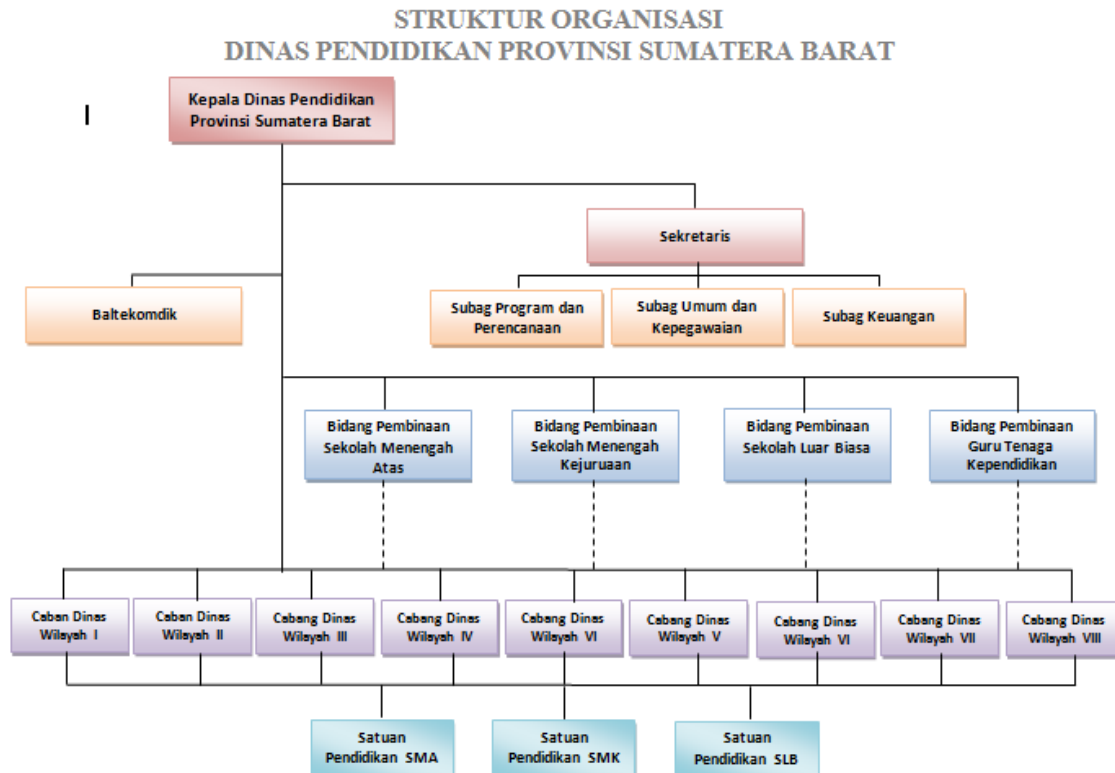
2. Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c) Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, lingkup provinsi dan kabupaten/Kota
- d) Melaksanakan kesekretariatan dan perencanaan Dinas
- e) Melakukan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB)
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
- g) Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan dengan Cabang Dinas Pendidikan
- h) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, dengan diberlakukannya Pergub tersebut dan dilantiknya pejabat struktural eselon IV a dan IV b pada Cabang Dinas dan hilangnya pejabat eselon IV a dibawah Bidang SMA/K dan SLB Bagan

Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan telah ditetapkannya Pergub No. 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sehingga terjadi perubahan bagan struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :



Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di atas, terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Pembinaan SMA;
3. Pembinaan SMK;
4. Pembinaan SLB;
5. Pembinaan GTK;
6. Cabang Dinas;
7. UPTD Baltekkomdik;
8. Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat,

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu :

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan program, anggaran, laporan, keuangan, kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan laporan;
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan perencanaan;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan
- e) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.

b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Menengah Atas; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Menengah Atas.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Luar Biasa;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Luar Biasa; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Luar Biasa.

e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

Fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan.
- b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja tentang pembinaan calon kepala sekolah, pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
- c. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja penyediaan wadah bagi guru untuk mempublikasikan penulisan karya ilmiah baik cetak maupun elektronik.

f. Cabang Dinas

Dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang urusan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka dibentuk Cabang Dinas dengan pergub No. 42 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Bukittinggi, Kelas A (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Agam)
- b) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman, Kelas A (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)
- c) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Aro Suka, Kelas A (Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan)
- d) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Payakumbuh, Kelas A (Kota payakumbuh, Kab. Tanah datar, Kab. Lima Puluh Kota)
- e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Muaro Sijunjung, Kelas A (Kab. Sijunjung, Kab. Sawahlunto, Kab. Dharmasraya)
- f) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kinali, Kelas A (Kab. Pasaman, dan kab. Pasaman Barat)
- g) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Painan, Kelas A (Kab. Pesisir Selatan)
- h) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A (Kab. Kep. Mentawai)

Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A terdiri dari :

- a. Kepala Cabang
- b. Subag tata usaha
- c. Seksi sekolah menengah Atas
- d. Seksi Sekolah menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
- e. Kelompok jabatan Fungsional

Tugas Pokok :

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, teknis operasional, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan; dan
- c. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Baltekkomdik membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Subag Pengembangan Program dan evaluasi;
3. Subag Pemanfaatan Media, TIK Pendidikan.

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (UPTD) Baltekkomdik memiliki

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas yaitu teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan.

Fungsi :

- a. Memfasilitasi Penyusunan rencana dan program kerja seksi-seksi di lingkungan UPTD Baltekkomdik
- b. Memfasilitasi penyusunan, perumusan dan komunikasi pendidikan
- c. Memfasilitasi pelayanan pengembangan teknologi dan komunikasi pendidikan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

Pengawas Sekolah, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2021 tercatat sebanyak 12.338 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Golongan dan Eselon
Tahun 2021

NO	Gol / Ruang	Eleson					Non Eleson		Jumlah
		I	II	III.A	III.B	IV	Tenaga Fungsional	Staf	
	<u>GOLONGAN. IV</u>								0
1	Golongan. IV/e							0	0
2	Golongan. IV/d						2	0	2
3	Golongan. IV/c		1				27	0	28
4	Golongan. IV/b			3	6	3	1729	1	1742
5	Golongan. IV/a				3	14	3368	35	3420
	Jumlah Gol. IV		1	3	9	17	5126	36	5192
	<u>Golongan. III</u>								
1	Golongan III/d					6	2163	110	2279
2	Golongan III/c					3	1943	92	2038
3	Golongan III/b					2	933	310	1245
4	Golongan III/a					0	183	989	1172
	Jumlah Gol. III		0	0		11	5222	1501	6734
	<u>Golongan. II</u>								
1	Golongan II/d						4	67	71
2	Golongan II/c						8	66	74
3	Golongan II/b						16	196	212
4	Golongan II/a						0	16	16
	Jumlah Gol. II						28	345	373
	<u>Golongan. I</u>								
1	Golongan I/d							21	21
2	Golongan I/c							5	5
3	Golongan I/b							13	13
4	Golongan I/a							0	0
	Jumlah Gol. I							39	39
	JML TOTAL	-	1	3	9	28	10.376	1.921	12.338

B. Aspek Strategis Organisasi

Pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Tersedianya lembaga layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi A dan B 60,05%;
- b. Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi \geq S1 96,35%;
- c. UKG 61,63%;
- d. Lulusan SMA/SMK 99,85%;
- e. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih tinggi
- f. Budaya ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) sebagai jati diri masyarakat Sumatera Barat.

Ketercapaian Aspek Strategis Organisasi dari sisi kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari **RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021** dan sesuai visi pembangunan Sumatera Barat 2016 - 2021 yaitu “*Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera*”. Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada **Misi Ketiga** yaitu “*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter Dan BerkualitasTinggi*”. Sedangkan Tujuan sesuai dengan Misi ke 3 yang terkait dengan Pendidikan tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta pengetahuan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan;
2. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal;
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal;
4. Disaat reformasi bermunculan Lembaga-lembaga pelatihan untuk Peningkatan Managemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tidak resmi;
5. Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri atau Disintegrasi Bangsa.

Disamping itu adanya beberapa tantangan atau ancaman dari luar, yakni :

1. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
2. Pesatnya Peningkatan Kualitas Pendidikan Provinsi tetangga;
3. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
4. Isorientasi penggunaan teknologi informasi.

D. Sistematika Penulisan

Sitematika pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini, disusun berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 065/676/ED/GBS-2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2021, Berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan Organisasi, Tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
- b. Grafikan umum mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Aspek Strategis Organisasi, dan
- c. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja, Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing- masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Eselon II
- 2) Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah tahun 2021

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN

Visi dan Misi Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mempedomani Tujuan dan Sasaran RPJMD maka Tujuan yang Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah “*Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat*” Sedangkan Indikator dan Target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Target Tahunan Capaian Tujuan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat	1. Harapan lama sekolah	13,94	14,20	14,50	14,80	15,09
	2. Rata-rata lama sekolah	8,46	8,49	8,56	8,63	8,66

Selanjutnya untuk mencapai Tujuan Jangka Menengah tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan
2. Meningkatnya Integritas Peserta Didik
3. Meningkatkannya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Meningkatnya Daya Saing Lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja.

Tabel 3
Target Tahunan Capaian Sasaran Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

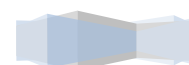
Misi 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi						
Tujuan	Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat						
Indikator	Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	68.85	71.03	73.27	74.35	74.6
		APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	86.20	86.58	86.96	97.8	98.03
		Angka Putus SMA	0.004	0.003	0.002	0.63	0.58
		Angka Putus SMK	0.01	0.01	0	0.73	0.68
2.	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Indek integritas UN SMA/SMK	66.57	67.52	68.49	69.47	-
		Indek Integritas Peserta Didik	68.27	71.92	76.34	82	85
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	100.83	101.72	102.62	98.25	98.5
		Angka Kelulusan SMK	100.49	101.25	102.01	98.15	99.12
		Angka tidak melanjutkan ke SMA	4.86	5.31	5.81	2.74	1.92
		Kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	74.02	75.80	77.62	80.93	-
		Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.07	85.96	86.65	78.18	79.74
		Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	61.32	65.82	71.15	78.18	79.74
4	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	44.99	48.08	51.38	50	52.05
		Jumlah lulusan SMK yang diterima di IDUKA (Dunia Usaha dan Industri)	27.71	28.79	29.92	50	58
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	58.51	58.52	B	B	BB

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, maka strategi penyelarasan strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera			
Misi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan mutu dan daya saing sekolah menengah melalui perbaikan infrastruktur sekolah menengah	-Meningkatkan ketersediaan SMA, SMK dan SLB, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) -Meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah
	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Meningkatkan Pendidikan Karakter Melalui Penyehatan Lingkungan Internal Sekolah Menengah yang Menyenangkan dengan Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kearifan Budaya Lokal dalam Proses Pembelajaran Oleh Guru dan warga sekolah menengah	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) secara merata Menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal Minangkabau

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Melalui Sistim Pendidikan dan Pelatihan untuk Penguasaan ICT dengan Menjalin Kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dan Mitra di Luar Negeri	Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah termasuk sekolah khusus dan layanan khusus
		Meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi pendidikan	Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti
	Meningkatnya Daya Saing Lulusan Pendidikan Menengah untuk Masuk Perguruan Tinggi atau Pasar Bekerja	Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan menengah dan literasi teknologi informasi	Penyediaan layanan dan kebutuhan operasional pendidikan bagi sekolah menengah
		Meningkatkan dan Mewujudkan Keterserapan Lulusan SMA dan SMK di Perguruan Tinggi dan di Dunia Usaha/Industri dan Kewirausahaan	Menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dan luar negeri
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Tata kelola Layanan Pendidikan	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan melalui penyehatan manajemen organisasi sekolah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata kelola Layanan Pendidikan



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152-31513 Padang

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADIB ALFIKRI, SE, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 22 November 2021

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

ADIB ALFIKRI, SE, M. SI
NIP. 19730413 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
			(%)
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	1. APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	74.6
		2. APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	98.03
		3. Angka Putus SMA	0.58
		4. Angka Putus SMK	0.68
2.	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	1. Indek Integritas Peserta Didik	85
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	98.5
		2. Angka Kelulusan SMK	99.12
		3. Angka tidak melanjutkan ke SMA	1.92
		4. Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	79.74
		5. Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	79.74
4.	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja	1. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	52.05
		2. Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	58
5.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB/76 (Tentatif)



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 2.320.060.958.934	APBD-P
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 710.988.586.175	APBD-P
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 367.224.900	APBD-P
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.598.849.800	APBD-P
	JUMLAH	Rp 3.034.015.619.809	APBD-P

Padang, 22 November 2021

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

ADIB ALFIKRI, SE, M. SI
NIP. 19730413 199703 1 001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Model A (jika capaian > adalah baik) dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Model B (jika capaian < adalah baik) dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Adapun skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap sasaran mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana berikut :

Tabel 5

Skala Penilaian dalam Menilai Tingkat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel 6
Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan TA 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	1. APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	TW IV	74,6	77,19	103,47
		2. APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	TW IV	98,03	103,47	105,54
		3. Angka Putus SMA	TW IV	0,58	0,14	175,86
		4. Angka Putus SMK	TW IV	0,68	0,30	155,88
2	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Indek Integritas Peserta Didik	TW IV	85	N/A	-
3	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	TW IV	98,5	99,11	100,62
		2. Angka Kelulusan SMK	TW IV	99,12	97,27	98,13
		3. Angka tidak melanjutkan ke SMA	TW IV	1,92	0,39	179,69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
		4. Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	TW IV	79,74	78,49	98,43
		5. Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	TW IV	79,74	40,13	50,32
4	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja	1. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN	TW IV	52,05	46,85	90,01
		2. Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	TW IV	58	45	77,59
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	TW IV	B	B	100
		2. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	TW IV	98	98,95	100,97
		3. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	TW IV	98	95,34	97,28

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban memenuhi target kinerja arah kebijakan dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.



Berdasarkan peralihan kewenangan yang diamanatkan UU No 23 tahun 2014, pembangunan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat lebih dititik beratkan pada pembangunan program :

1. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
2. Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan
3. Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
4. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Berikut disajikan tingkat ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berdasarkan 5 sasaran strategis. Kelima arah kebijakan tersebut didukung oleh program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bagian, Bidang, UPTD dan Cabang Dinas Wilayah I-VIII di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan penjelasannya :

➤ **Sasaran 1 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan**

Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus. Dengan total anggaran Rp. 710.988.586.175,- dan realisasi Rp.567.137.321.278,-. Program ini bertujuan untuk:

1. Mendorong tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.
2. Meningkatkan kepercayaan publik bahwa sekolah tersebut dapat menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar Nasional.
3. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - c. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer

- d. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
 - e. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - f. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - g. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - h. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - i. Pembangunan Fasilitas Parkir
 - j. Pembangunan Kantin Sekolah
 - k. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - l. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
 - m. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
 - n. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - o. Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - p. Pengadaan Mebel Sekolah
 - q. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - r. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - c. Pembangunan Ruang Praktik Siswa
 - d. Pembangunan Ruang Laboratorium
 - e. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - f. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - g. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - h. Pembangunan Fasilitas Parkir
 - i. Pembangunan Kantin Sekolah
 - j. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
 - k. Rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula
 - l. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - m. Pengadaan Mebel Sekolah
 - n. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - o. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - p. Pemeliharaan Mebel Sekolah
 - q. Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa

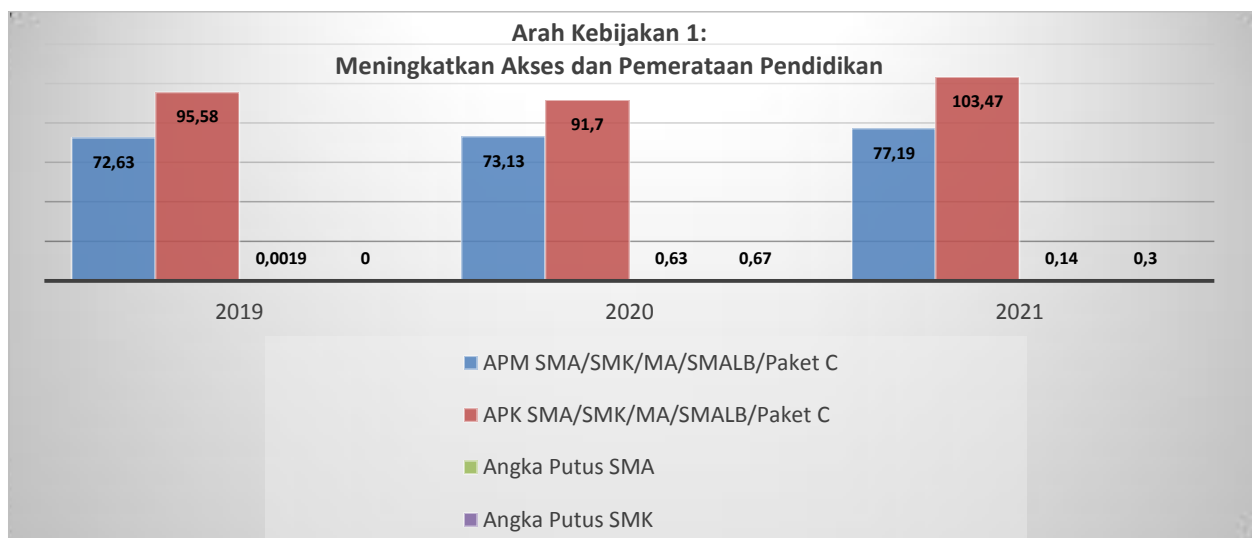


3. Pengelolaan Pendidikan Khusus, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
 - c. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - d. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - e. Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
 - f. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - g. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan Arah Kebijakan 1
Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Tahun (2019, 2020 dan 2021)

ARAH KEBIJAKAN 1:					
Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan					
Indikator Kinerja	2019	2020	2021		
	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	72,63	73,13	74,6	77,19	103,47
2. APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	95,58	91,7	98,03	103,47	105,54
3. Angka Putus SMA	0,0019	0,63	0,58	0,14	175,86
4. Angka Putus SMK	0	0,67	0,68	0,30	155,88



Gambar 1
Perbandingan Arah Kebijakan 1
Meningkatkan Akses Pemerataan Pendidikan

Gambar 1. Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan menunjukkan persentase capaian APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 72,63% di tahun 2019, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 73,13% dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 77,19%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C tahun 2021 :

$$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah (16 – 18 tahun)}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah (16 – 18 tahun)}} \times 100\% = \frac{226.812}{293.852} \times 100\% \\ = 77,19 \%$$

Sedangkan persentase capaian APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 95,58% di tahun 2019, kemudian menjadi 91,7% di tahun 2020, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 103,47%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C tahun 2021 :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah (16 – 18 tahun)}} \times 100\% = \frac{304.061}{293.852} \times 100\% \\ = 103,47 \%$$

Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dan APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C yaitu survey lapangan, perencanaan rehab dan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana.

Tabel 8
Realisasi APK dan APM Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jlh Siswa Usia Sekolah (16-18)	Jlh Siswa Keseluruhan	Jlh Penduduk Usia Sekolah (16-18)	APK	APM
1	SMA	122.975	149.698	293.852	50,94	41,85
2	SMK	70.242	92.021	293.852	31,32	23,90
3	SLB	1.379	6.965	293.852	2,37	0,47
4	MA	29.027	37.258	293.852	12,68	9,88
5	Paket C	3.189	18.119	293.852	6,17	1,09
	TOTAL	226.812	304.061	293.852	103,47	77,19

Sumber: Dapodik dan BPS Tahun 2021

Untuk Angka Putus SMA sebesar 0,0019% di tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 0,63% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,14%. Sedangkan Angka Putus SMK sebesar 0% di tahun 2019, menurun di tahun 2020 menjadi 0,67% dan meningkat 0,3% di tahun 2021.

Tabel 9
Data Siswa Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Status Sekolah dan Jenis Kelamin Jenjang SMA Tahun 2021

Kabupaten/Kota	NEGERI		SWASTA		Total DO	Siswa Tahun Lalu	Persentase DO
	jumlah do_lk	jumlah do_pr	jumlah do_lk	jumlah do_pr			
Kab. Agam	10	8	2	-	20	10.658	0,19
Kab. Dharmasraya	3	-	1	-	4	5.267	0,08
Kab. Kepulauan Mentawai	4	8	-	-	12	4.179	0,29
Kab. Lima Puluh Koto	-	2	-	-	2	7.908	0,03
Kab. Padang Pariaman	11	7	13	3	34	12.509	0,27
Kab. Pasaman	3	1	2	-	6	7.608	0,08
Kab. Pasaman Barat	8	2	7	3	20	9.804	0,20
Kab. Pesisir Selatan	9	3	-	-	12	16.568	0,07
Kab. Sijunjung	2	-	-	-	2	5.320	0,04
Kab. Solok	28	9	-	-	37	8.021	0,46
Kab. Solok Selatan	1	2	-	-	3	4.553	0,07
Kab. Tanah Datar	4	5	-	-	9	9.543	0,09
Kota Bukittinggi	1	-	28	4	33	6.454	0,51
Kota Padang	2	2	-	-	4	24.103	0,02
Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	3.127	0,00
Kota Pariaman	5	-	-	-	5	4.294	0,12
Kota Payakumbuh	1	5	-	-	6	6.162	0,10
Kota Sawah Lunto	-	2	-	1	3	1.520	0,20
Kota Solok	-	-	-	-	-	4.065	0,00
Grand Total	92	56	53	11	212	151.663	0,14

Sumber: pdsp Kemdikbud Tahun 2021

Tabel 10
Data Siswa Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Status Sekolah dan Jenis Kelamin Jenjang SMK Tahun 2021

Kabupaten/Kota	NEGERI		SWASTA		Total DO	Siswa Tahun Lalu	Persentase DO
	jumlah do_lk	jumlah do_pr	jumlah do_lk	jumlah do_pr			
Kab. Agam	27	9	2	-	38	6.828	0,56
Kab. Dharmasraya	2	-	-	-	2	3.248	0,06
Kab. Kepulauan Mentawai	1	1	-	-	2	490	0,41
Kab. Lima Puluh Koto	2	-	-	1	3	4.181	0,07
Kab. Padang Pariaman	1	-	2	2	5	3.986	0,13
Kab. Pasaman	10	-	-	-	10	4.368	0,23
Kab. Pasaman Barat	4	2	4	-	10	6.951	0,14
Kab. Pesisir Selatan	29	-	34	3	66	6.807	0,97
Kab. Sijunjung	1	3	-	-	4	4.108	0,10
Kab. Solok	3	2	-	-	5	3.293	0,15
Kab. Solok Selatan	3	4	-	-	7	1.920	0,36
Kab. Tanah Datar	21	6	-	-	27	3.722	0,73
Kota Bukittinggi	11	-	-	2	13	6.011	0,22
Kota Padang	46	16	10	4	76	20.679	0,37
Kota Padang Panjang	5	1	-	-	6	2.056	0,29
Kota Pariaman	-	-	2	-	2	4.350	0,05
Kota Payakumbuh	1	-	1	-	2	6.332	0,03
Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	1.627	-
Kota Solok	2	1	-	-	3	3.309	0,09
Sumatera Barat	169	45	55	12	281	94.266	0,30

Sumber: pdsp Kemdikbud Tahun 2021

Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja Angka Putus SMA dan SMK yaitu menginstruksi sekolah untuk membuat regulasi yang jelas untuk mengeluarkan siswa, pihak sekolah harus Mengetahui alasan jelas kenapa seorang siswa mengundurkan diri, mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah khusus yang tidak terpecahkan.

Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target pada sasaran 1 Meningkatkan Akses Pemerataan Pendidikan yaitu :

- 1) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- 2) Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di Kabupaten/Kota.
- 3) Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

Tindak Lanjut/Solusinya yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- 2) Menyelaraskan program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di Kabupaten/Kota.
- 3) Meningkatkan akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya Integritas Peserta Didik**

Untuk tahun 2021 arah kebijakan dengan sasaran meningkatnya Integritas Peserta Didik indikatornya terarah kepada Pelaksanaan Asesmen Nasional yaitu Literasi dan Numerasi pengganti Ujian Nasional. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meningkatnya Integritas Peserta Didik didukung oleh Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pengelolaan Pendidikan di program tersebut dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dengan sub kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4. Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Arah Kebijakan 2
Meningkatnya Integritas Peserta Didik

ARAH KEBIJAKAN 2:				
Meningkatnya Integritas Peserta Didik				
Indikator Kinerja	2019	2020	2021	
	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Indek Integritas Peserta Didik	76,18	78,68	85	N/A



Gambar 2
Perbandingan Arah Kebijakan 2
Meningkatnya Integritas Peserta Didik

Gambar 2 Meningkatnya Integritas Peserta Didik dalam hal ini indeks integritas UN SMA/SMK pada tahun 2019 persentase 88,24%, pada tahun 2019 berdasarkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional maka untuk Ujian Nasional di tiadakan pelaksanaannya mulai dari tahun 2020. Sedangkan persentase Indeks Integritas Peserta Didik pada tahun 2019 yaitu 76,8% dan meningkat di tahun 2020 menjadi 78,68%, lalu di tahun 2021 masih di tiadakan pelaksanaan Ujian Nasional sama dengan tahun 2021 sesuai dengan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian.

➤ **Sasaran 3 : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan**

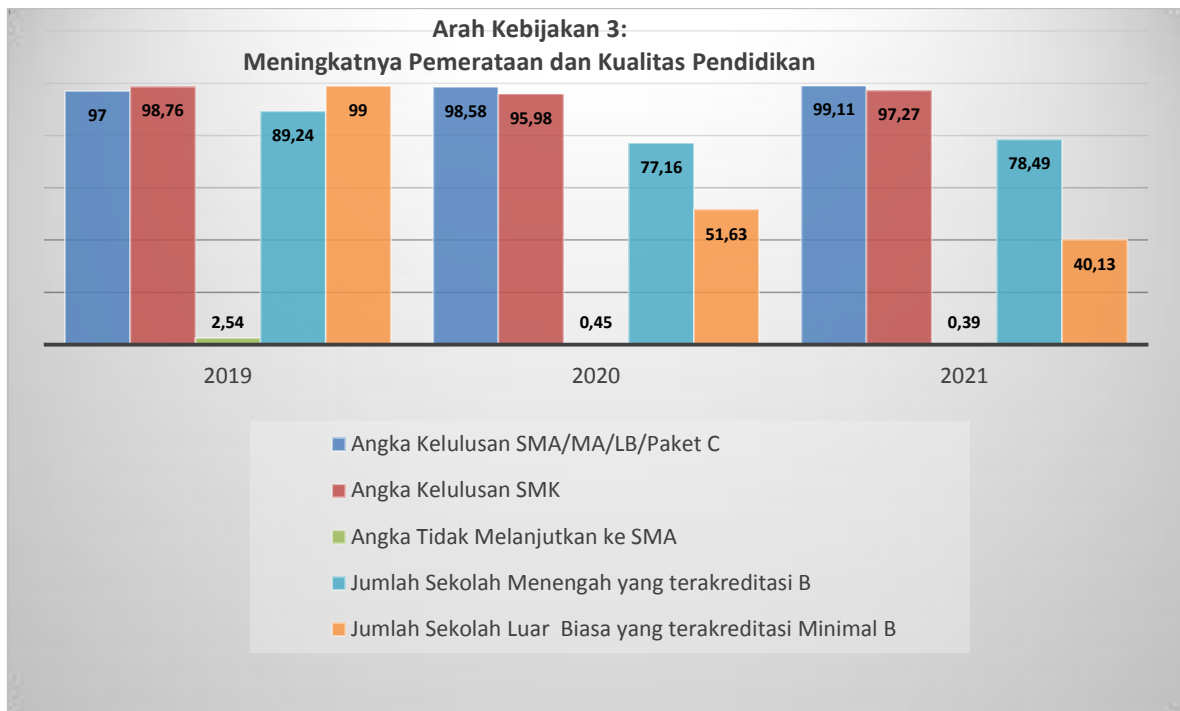
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Hal ini terletak pada ketersediaan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan keahlian khusus tentunya kekurangan ini semakin banyak terasa, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian keunggulan dan daya saing pendidikan di level regional, tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan sekali dengan jumlah guru pada SMA, SMK dan SLB se-Sumatera Barat. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan diwujudkan melalui sub kegiatan :

1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
3. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
4. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
6. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
7. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
8. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Arah Kebijakan 3
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

ARAH KEBIJAKAN 3:					
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan					
Indikator Kinerja	2019	2020	2021		
	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	
Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	97	98,58	98,5	99,11	100,61
Angka Kelulusan SMK	98,76	95,98	99,12	97,27	98,13
Angka Tidak Melanjutkan ke SMA	2,54	0,45	1,92	0,39	179,69
Jumlah Sekolah Menengah yang terakreditasi B	89,24	77,16	79,74	78,49	98,43
Jumlah Sekolah Luar Biasa yang terakreditasi Minimal B	99	51,63	79,74	40,13	50,33



Gambar 3
Perbandingan Arah Kebijakan 3
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Gambar 3. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan menunjukkan persentase Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C sebesar 97% di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 98,58% tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 99,11%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C tahun 2021 :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah siswa SMA/MA/LB/Paket C yang lulus tahun 2021}}{\text{Jumlah siswa SMA/MA/LB/Paket C pada jenjang akhir tahun 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{47.192}{47.616} \times 100\% \\ &= 99,11 \% \end{aligned}$$

Angka Kelulusan SMK menunjukkan persentase sebesar 98,76% di tahun 2019, kemudian 95,98% di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 97,27%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator Angka Kelulusan SMK tahun 2021 :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah siswa SMK yang lulus tahun 2021}}{\text{Jumlah siswa SMK pada jenjang akhir tahun 2020}} \times 100\% = \frac{26.426}{27.169} \times 100\% \\ &= 97,27 \% \end{aligned}$$

Angka tidak melanjutkan ke SMA menunjukkan persentase sebesar 2,54% di tahun 2019, di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 0,45% dan terus meningkat di tahun 2021 sebesar 0,39%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator Angka tidak melanjutkan ke SMA tahun 2021 :

$$\begin{aligned} 100 - \left(\frac{\text{Jumlah siswa baru kelas 10}}{\text{Jumlah siswa lulus kelas 9}} \times 100\% \right) &= 100 - \left(\frac{68.548}{68.814} \times 100\% \right) \\ &= 100 - 99,61 \\ &= 0,39 \% \end{aligned}$$

Jumlah Sekolah Menengah yang terakreditasi minimal B menunjukkan persentase sebesar 89,24% di tahun 2019, dan di tahun 2020 sebesar 77,16% dan di tahun 2021 meningkat menjadi 78,49%. Dan Jumlah Sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B menunjukkan persentase sebesar 99% di tahun 2019, kemudian menjadi 51,63% di tahun 2020 dan di tahun 2021 menjadi 40,13%.

Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target pada sasaran 3 Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan yaitu :

- 1) Masih ada Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah (D4/S1).
- 2) Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan.
- 3) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

Tindak Lanjut/Solusinya yaitu:

- 1) Memberikan peluang kepada Guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang belum (D4/S1).
- 2) Pemerataan Sebaran Guru antara perkotaan dan pedesaan.
- 3) Meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

➤ **Sasaran 4 : Meningkatkan Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk Masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja**

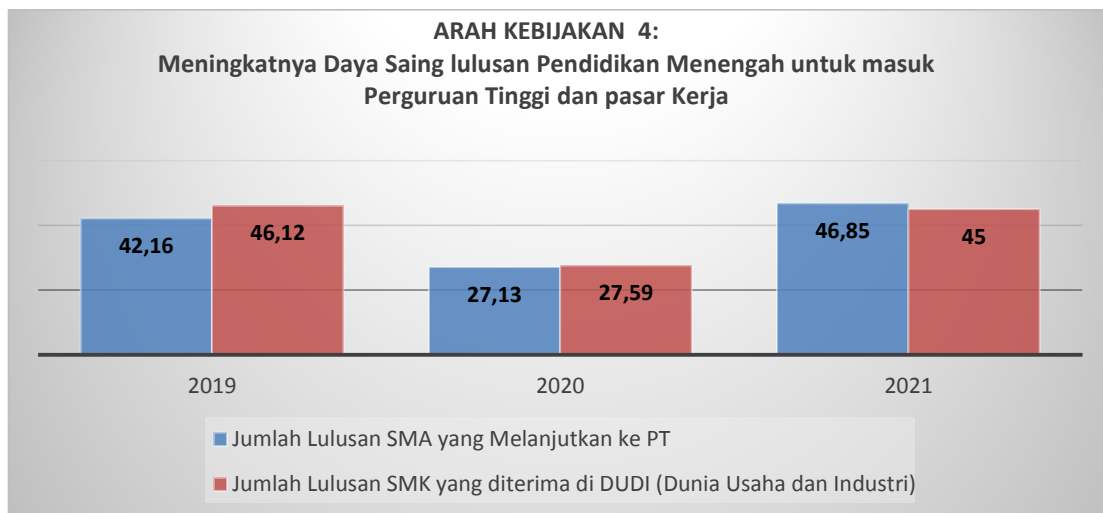
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu anggaran Rp.422.928.500.470,- dan realisasi Rp.339.014.797.371,- (sebesar 80,16%).

Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja diwujudkan melalui sub kegiatan: 1) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, 2) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan, 3) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus, 4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan.

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Arah Kebijakan 4
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja

ARAH KEBIJAKAN 4:					
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk perguruan Tinggi dan pasar Kerja					
Indikator Kinerja	2019	2020	2021		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Lulusan SMA yang Melanjutkan ke PT	42,16	27,13	52,05	46,85	90,01
Jumlah Lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	46,12	27,59	58	45	77,59



Gambar 4
Perbandingan Arah Kebijakan 4
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja

Gambar 4. Meningkatkan Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar kerja menunjukkan persentase Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT sebesar 42,16% di tahun 2019, kemudian tahun

2020 menjadi 27,13% dan di tahun 2021 meningkat menjadi 46,85%. Sedangkan Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI menunjukkan persentase sebesar 46,12% di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 sebesar 27,59% dan di tahun 2021 meningkat menjadi 45%.

Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target pada sasaran 4 Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja yaitu :

- 1) Belum ideal jumlah lulusan SMA dengan yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit.
- 2) SMK belum mampu menghasilkan tamatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Industri dan dunia kerja.

Tindak Lanjut/Solusinya yaitu:

- 1) Mensosialisasikan perguruan tinggi negeri favorit kepada siswa SMA.
- 2) Meningkatkan kemampuan tamatan SMK sesuai kebutuhan dan tuntutan Industri dan dunia kerja .

➤ **Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi didukung oleh program didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran Rp 2.320.060.958.934,- dan realisasi Rp 2.271.254.413.180,- (97,90%). Meningkatnya Tata Kelola Organisasi diwujudkan melalui kegiatan :

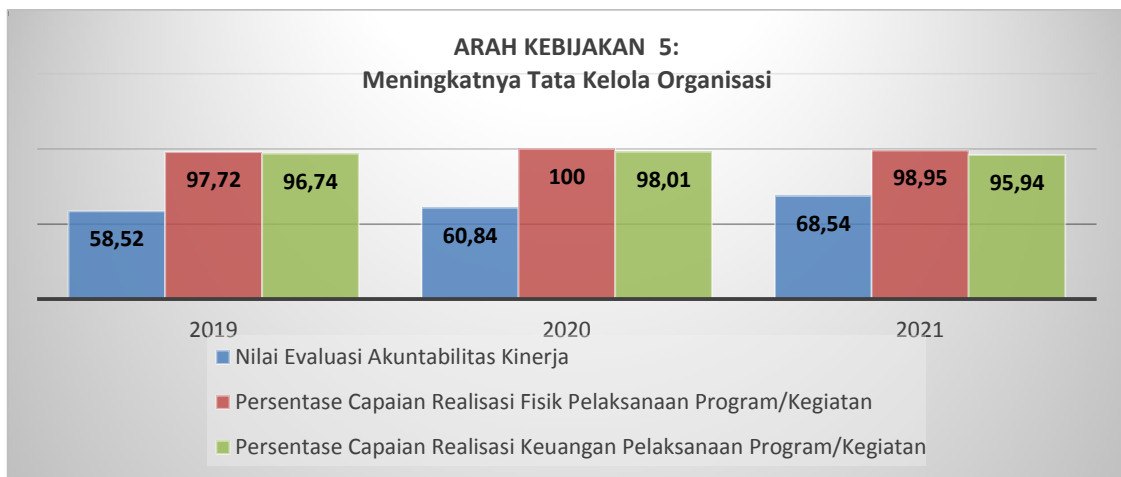
- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi diwujudkan melalui:
 1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan kegiatan:
(1)Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, (3) Penyediaan Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor, (4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, (5)Penyediaan Alat Tulis Kantor, (6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, (8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, (9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, (10)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah, (11)Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, (12) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, (13) Penyediaan Makanan dan Minuman.

2. Meningkatnya Pengelolaan Sapras dengan kegiatan: (1) Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi, (2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, (3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, (4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, (5) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, (6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 3. Meningkatnya Pengelolaan Cabang Dinas dengan kegiatan: (1) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah I (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman), (2) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah II (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman), (3) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Solok Selatan), (4) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota), (5) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah V (Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kab. Dharmasraya), (6) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VI (Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat), (7) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan), (8) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai).
- b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan diwujudkan melalui :
1. Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan Organisasi dengan kegiatan : (1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, (2) Pengelolaan Dana BOS
 2. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi dengan kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan (2) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.
- c. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan, diwujudkan melalui Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan kegiatan : (1) Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan, (2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/ Tahunan, (3) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD,

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Arah Kebijakan 5
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

ARAH KEBIJAKAN 5:					
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					
Indikator Kinerja	2019	2020	2021		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	58,52 (CC)	60,84 (B)	B (Tentatif)	68,54 (B)	100
2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	F : 97,72 K: 96,74	F : 100 K: 98,01	98%	F : 98,95 K : 95,94	F : 100,97 K: 97,28



Gambar 5
Perbandingan Arah Kebijakan 5
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Gambar 5. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dituangkan dalam 3 indikator kinerja yaitu:

- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase sebesar 58.52% di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 60,84% dan terus meningkat di tahun 2021 sebesar 68,54%.
- Capaian realisasi fisik menunjukkan persentase sebesar 97,72% di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 100% di tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar 98,95%.
- Capaian realisasi keuangan program kegiatan menunjukkan persentase sebesar 96,74% di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 98,01% di tahun 2020 dan di tahun 2021 menjadi 95,94%.

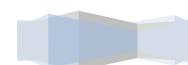
D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Dari 4 program tersebut terdiri dari 188 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. DINAS PENDIDIKAN

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome dari program yaitu Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2 Kegiatan, 1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bln
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5	Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Bln
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Bln
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kegiatan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	259	Stel
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Kegiatan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bln
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Unit
		Pengadaan Mebel	22	Set
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22	Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Buah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Ls

- b. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan outcome dari program yaitu Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Mengengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penambahan Ruang Kelas Baru	16	Sekolah
		Pembangunan Ruanag Guru / Kepala Sekolah/ TU	5	Sekolah
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	7	Sekolah
		Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	11	Sekolah
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	Sekolah
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	Sekolah
		Pembangunan Ruang Serbaguna/ Aula	5	Sekolah
		Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	195	Sekolah



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
		Pembangunan Fasilitas Parkir	4	Sekolah
		Pembangunan Kantin Sekolah	3	Sekolah
		Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah	13	Sekolah
		Rehabilitasi Sedang /Berat Laboratorium Komputer	2	Sekolah
		Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Serbaguna /Aula	1	Sekolah
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11	Sekolah
		Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1	Sekolah
		Pengadaan Mebel Sekolah	54	Sekolah
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	67	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1772	Orang
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	Bulan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	3	Kegiatan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6	Kegiatan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236	Sekolah
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penambahan Ruang Kelas Baru	5	Sekolah
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	Sekolah
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20	Sekolah
		Pembangunan Ruang Laboratorium	15	Sekolah
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2	Sekolah
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	4	Sekolah
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	68	Sekolah
		Pembangunan Fasilitas Parkir	2	Sekolah
		Pembangunan Kantin Sekolah	1	Sekolah
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	7	Sekolah
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	3	Sekolah		



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
		Rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula	2	Sekolah
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	29	Sekolah
		Pengadaan Mebel Sekolah		Sekolah
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Kegiatan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Sekolah
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	Sekolah
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	5	Kegiatan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	Kegiatan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2	Kegiatan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111	Sekolah
		Pemeliharaan Mebel Sekolah		Sekolah
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	29	Sekolah
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	11	Sekolah
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	Sekolah
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7	Sekolah
		Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	3	Sekolah
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	Sekolah
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	Sekolah
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	Sekolah
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	1	Kegiatan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3	Kegiatan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29	Sekolah



- c. Program Pengembangan Kurikulum, yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1	Mapel

- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4	Kegiatan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	1	Kegiatan

2. UPTD BALTEKOMDIK

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16	Stel
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan



3. CABANG DINAS

a. PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan



b. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan

2). Program Pengelolaan Pendidikan, yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMA)	12	Bulan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMK)	12	Bulan
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SLB)	12	Bulan



c. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan



d. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH,
KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan



e. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO,
KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung
oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan



f. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

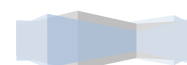
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan



g. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Bulan



h. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11	Stel
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan



Untuk mendukung urusan wajib Dinas Pendidikan Tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 Program yang didukung oleh 13 kegiatan dan 188 sub kegiatan.

Tabel 15
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.320.060.958.934	2.271.254.413.180	97,90
II	Program Pengelolaan Pendidikan	710.988.586.175	567.137.321.278	79,77
III	Program Pengembangan Kurikulum	367.224.900	356.863.147	97,18
IV	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.598.849.800	2.269.941.600	87,34
	Total	3.034.015.619.809	2.892.725.790.176	95,34



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud adalah janji Dinas Pendidikan Provinsi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (Lima) sasaran strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta 15 (lima belas) target kinerja yang mendukung berjalannya sasaran strategis tersebut.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai pengukuran kinerja, dari sebanyak 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, rata-rata capaian kinerjanya tinggi di tahun 2020. Namun demikian tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Namun, pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) ada penurunan yang terdampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

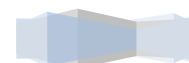
Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

B. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LAKIP Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan PNS.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2021 (terlampir)
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III dan IV (terlampir)

